

## **ABSTRAKSI**

### **KESIAPAN APARATUR DESA DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN ASAS AKUNTABEL TRANSPARANSI DAN PARTISIPATIF**

**(Studi Pada Desa Babotin Maemina Kecamatan Botinleobele Kabupaten Malaka)**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang baik itu berupa uang maupun barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dijalankan berdasarkan azas Akuntabilitas Transparansi serta Partisipatif merupakan suatu tanggungjawab pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dan partisipasi dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa Babotin Maemina, kecamatan Botinleobele, kabupaten Malaka adalah pemerintah desa yang mendukung adanya *Good Governance* khususnya akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Desa Babotin Maemina kurang transparan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan APBDes dan akuntabilitas mengenai pengelolaan keuangan desa seperti tidak adanya website atau situsonline dan papan informasi desa. Serta masyarakat yang tidak terlalu kritis terhadap proses pengelolaan keuangan desa dikarenakan kurangnya musyawarah seperti sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat desa babotin maemina terhadap program-program desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas transparansi dan partisipatif pemerintah desa terhadap pengelolaan Keuangan Desa di desa Babotin Maemina, kecamatan Botinleobebe, kabupaten Malaka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dengan teknik semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pihak aparat pemerintah desa Babotin Maemina yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan salah satu warga desa Babotin Maemina sebagai perwakilan dari masyarakat, yang berjumlah 3 orang informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Babotin Maemina sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dari segi akuntabilitas, pengelolaan keuangan di desa babotin maemina telah mencatat seluruh penerimaan dan pengeluarannya dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Pajak serta diterbitkannya Laporan realisasi APBDesa dan Laporan kegiatan setiap akhir tahun anggaran sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan dan pengendalian keuangan Desa Babotin Maemina. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Babotin Maemina menggunakan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Sedangkan dari segi partisipatif, diadakannya musyawarah yang dilakukan untuk perancangan peraturan desa tentang APBDesa yang mengikutsertakan BPD, Tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga yang terdapat di Desa Babotin Maemina. Meskipun pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.

**Kata kunci :** *pengelolaan keuangan desa, akuntabel, transparansi dan partisipatif*